

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor. 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

_____, *Undang-Undang Karantina kesehatan*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6234.

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lakukan Pemerintah Daerah*, permendagri Nomor 20 tahun 2020, Nomor 249.

_____, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, PERPU Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

_____, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

_____, *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2, Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali*, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021.

_____, *Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease Virus (COVID 19)*.

B. Buku-buku

Amran Saudi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

I Nyoman Gede, *Hukum Adminstrasi Negara*, Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.

- Jimly Assihiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Edisi Kedua, Cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara (Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum)*, Malang: Setara Press, 2016.
- Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laical Marzuki, J.B.J.M. Ten Berger, P.J.J. van Buuren, F.A.M. Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Ridwa, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta; FH UII Press, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2001.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Sunaryati Hartono, *Hukum ekonomi Pembangunan*, Bandung: Bina Cipta, 1988.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komperhensif, Perubahan UUD NKRI 1945, *Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/ Fundamental Negara*. (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.

UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2020.

C. Lain-lain

Achmad Syauqi, *Jalan Panjang Covid-19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian)*, *Article Info, JKUBS, Vol. 1 No. 1 2020, hlm. 2-3*, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>, diakses pada tanggal 27 Maret 2020, Pukul 17:19 WIB.

Agatha Olivia Victoria, "Soal Perppu Corona Kebal Hukum, Sri Mulyani: Tak Berlaku Jika Korupsi" <https://katadata.co.id/berita/2020/05/04/soal-perppu-corona-kebal-hukum-sri-mulyani-tak-berlaku-jika-korupsi> diakses pada 16 Juli 2022

Akbar Ridwan, Pemerintah Harus Jamin Kebutuhan Pokok Masyarakat Terpenuhi Saat PSBB, <https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-harus-jamin-kebutuhan-pokok-terpenuhi-saat-psbbb1ZLh9sVp>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 9:33 WIB.

Andrian Pratama, "Polemik Perppu No. 1 Tahun 2020" <https://tirto.id/polemik-perppu-corona-saat-sri-mulyanidkk-tak-bisa-dipidana-eKdC> diakses pada 13 Mei 2022.

Bagus Pinandoyo, "Benarkah Perpu 1 2020 Menimbulkan Kekuasaan Absolut?" <https://www.kompasiana.com/baguspinandoyo/5e87f16ad541df509a71b632/benarkah-perppu-1-2020-menimbulkan-kekuasaan-absolut-bagi-pemerintah?page=2> diakses pada 15 Mei 2020

Desri Tiara Salsabila, *Sumber Kewenangan Pemerintah*, https://osf.io/zvsj2/download.file:///C:/Users/ASUS/Downloads/HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA_TIARA.docx.pdf. Diakses pada 11 Januari 2022, Pukul 11:30 WIB.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hlm. 11.

Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018. hlm.16. <https://journal.uui.ac.id/JIPRO.article.download>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2022, Pukul 21:42 WIB.

Fahima Ramadhan Firdaus Dan Anna Erliyana, *Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, PALAR (Pakuan Law Review), Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020.*

Fahmi Ramahdan Firdaus dan Anna Eliyana, *Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Journal PALAR (Pakuan Law Riview) Volume 06, Nomor. 02, Juli-Desember 2020*, hlm. 29. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>, diakses pada 9 Juni2020, pukul 21:43 WIB.

GeneCraft Labs, *Artikel, Sejarah Coronavirus, Seluk Beluk si Penyebab Wabah Covid-19*, <https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>. Diakses Tanggal 26 Maret 2022, Pukul 12:38.

Glory Miliani Ampow dkk, "Penerapan Diskresi Oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Lex Administratum, Vol. IX, No. 3, April 2021.*

<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses 23 Maret 2021.

<https://www.paei.or.id/orytchax/2020/04/Pedoman-Pencegahan-dan-Pengendalian-Covid-19-Hal-1-68.pdf>, diakses pada 09 Desember 2021, Pukul 11:19 WIB.

Humas, *Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | *Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19* (setkab.go.id), diakses pada tanggal 27 Maret 2022, Pukul 21:17 WIB.

Ibnu Sina Chandranegara, "Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar-Lembaga Negara: Kajian atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 1, April 2012.

Ifabrix. Ciri-ciri Negara Hukum Secara Umum dan Menurut Para Ahli yang Benar, <https://www.ifabrix.com/2017/10/ciri-ciri-negara-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, Pukul 20:35 WIB.

Indra Rahmatullah, Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 2 Tahun 2020, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/16108/7433>. Diakses pada Tanggal 3 Maret 2020 Pukul 23:45 WIB.

Janpatar Simamora, "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Visi UHN*, Vol.18, No.1, 2010.

Julista Mastamu, "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal sasi*, Vol. 17 No. 2, April-Juni 2011.

Lubna, Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 3, No. 7 April 2015. hlm.161-162. <https://jurnalius.ac.id/ojs/jurnalisIUS.article.view.pdf>. Diakses pada 11 Januari 2022, Pukul 12:06.

Lutfi Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 1, Juni 2015.

Rahajeng Kusumo Hastuti, "Agresif! Pemerintah Targetkan 10.000 Tes PCR perHari", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200415160224-4-152163/agresif-pemerintah-targetkan-10000-tes-pcr-per-hari>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 9:35 WIB.

Reza Yustianto, Diskresi Pemerintah Dalam Penanganan covid-19, *Jurnal Restorasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum* Vol.5 No. 1, 2022.

Sabarudin Hulu, Diskresi Untuk Solusi Penanganan Covid-19, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-untuk-solusi-penanggulangan-covid-19>, diakses pada tanggal 9 Juni 2022, pukul 21:28 WIB.

Vina Fadhrotul Mukaromah, *Simak Berikut Daftar 6 Pembatasan di PSBB untuk Cegah Covid-19, Simak! Berikut Daftar 6 Pembatasan di PSBB untuk Cegah Covid-19 Halaman 3 - Kompas.com*, diakses pada tanggal 27 Maret 2022, Pukul 21:21 WIB.

WHO, Covid-19, <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON229>, diakses pada 09 Desember 2021, Pukul 11:16 WIB.

Yusri Munaf, *Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empiris)*, Jurnal Kajian Pemerintah, Vol 4, No 1 Maret 2018. hlm. 11, <https://journal.uir.ac.id> Diakses pada 31 Desember 2021, Pukul 23:08 WIB.

Zaherman Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 6 Nomor 3, November 2017. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/5/22>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2022, Pukul 23:21 WIB.